



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDANMERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10110

Nomor : 87 /BUA/OT.01.2/5/2017
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP)

10 Mei 2017

Yth.

Daftar Terlampir

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan, diminta Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama.

Selanjutnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dikirimkan ke masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama dan tembusan kepada :

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 2. Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi
- Paling lambat tanggal 22 Mei 2017.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi



Drs. Aco Mur, M.H

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Badan Pengawasan MA RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA RI.

Lampiran Surat Kepala Badan Urusan Administrasi
Nomor : 87 /BUA/OT.01.2/5/2017
Tanggal : 10 Mei 2017

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang
4. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
11. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
12. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
13. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
14. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
15. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
16. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
17. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
18. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
19. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
20. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
21. Ketua Pengadilan Tinggi Palu
22. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
23. Ketua Pengadilan Tinggi Manado
24. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo
25. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
26. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
27. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
28. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
29. Ketua Pengadilan Tinggi Mauku Utara
30. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
31. Ketua Mahkamah Syariah Aceh
32. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
33. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
34. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
35. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
36. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

37. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
38. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
39. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
40. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
41. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
42. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
43. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
44. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
45. Ketua pengadilan Tinggi Agama Surabaya
46. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
47. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
48. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
49. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
50. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
51. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
52. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
53. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
54. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
55. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
56. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
57. Ketua pengadilan Tinggi Agama Ambon
58. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
59. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
60. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
61. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta
62. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
63. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
64. Kepala Pengadilan Militer Utama
65. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
66. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
67. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya